

# MEMBANGUN KESEPAHAMAN BUDAYA INDONESIA DAN MALAYSIA MENUJU MASYARAKAT BERWAWASAN GLOBAL

Elly Malihah

Program Studi Sosiologi, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

## ABSTRAK

Indonesia dan Malaysia adalah dua Negara tidak saja karena letak geografisnya sebagai tetangga melainkan memiliki keragaman budaya yang hampir sama, karena memiliki latar belakang ras yang hampir sama yaitu ras Melanesia. Karena itu munculnya masalah saling klaim tentang beberapa produk kebudayaan (tarian, lagu, alat musik) adalah hal yang wajar. Siapa sesungguhnya pemilik sebuah produk budaya? Jawabannya tentunya manusia dan masyarakat yang membangun dan melestarikan budaya tersebutlah pemiliknya. Karena kebudayaan lahir dari suatu masyarakat dan kebudayaan akan tetap bertahan selagi masyarakat itu melestarikannya.

Kata Kunci : budaya Indonesia, Malaysia, wawasan global

## PENDAHULUAN

Manusia dalam hidup kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan, karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Manusia hidup karena adanya kebudayaan, sementara itu kebudayaan akan terus hidup dan berkembang manakala manusia mau melestarikan kebudayaan dan bukan merusaknya. Dengan demikian manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam kehidupannya tak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan, setiap hari manusia melihat dan menggunakan kebudayaan, bahkan kadangkala disadari atau tidak manusia merusak kebudayaan.

Hubungan yang erat antara manusia (terutama masyarakat) dan kebudayaan lebih jauh telah diungkapkan oleh *Melville J. Herkovits* dan *Bronislaw Malinowski*, yang mengemukakan bahwa *cultural determinism* berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. (Selo Soemardjan, 1964: 115). Kemudian Herkovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang *superorganic*, karena kebudayaan yang berturun-temurun dari generasi ke generasi tetap hidup. Walaupun manusia yang menjadi anggota masyarakatnya sudah berganti karena kelahiran dan kematian.

Lebih jauh dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh E.B.Tylor (1971) dalam bukunya *Primitive culture*: kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan lain perkataan, kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Oleh karena itu manusia yang mempelajari kebudayaan dari masyarakat, bisa membangun kebudayaan (konstruktif) dan bisa juga merusaknya (destruktif).

Atas dasar itu sebagai Negara yang bersebelahan secara geograifis dan berdekatan secara asal-usul ras nampaknya masyarakat di kedua Negara tersebut memiliki kemiripan produk budaya terutama budaya dalam wujud aktivitas seperti kebiasaan, keseniaan, corak pakaian, bahasa. Sehingga siapa pemilik produk budaya tersebut ? jawabannya adalah kedua masyarakat pendukungnya tanpa melihat latar belakang secara geografis, politik bahkan hukum.

Secara umum tulisan ini menjelaskan bagaimana kebudayaan ada dan hidup di masyarakat dan bagaimana manusia menempatkan dirinya dalam kebudayaan serta makna kebudayaan bagi manusia itu sendiri, serta arti dan pentingnya kebudayaan dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi kedua bangsa bertetangga : Indonesia & Malaysia.

### **MASYARAKAT, KONFLIK, DAN UPAYA MEMBANGUN WAWASAN GLOBAL/REGIONAL**

Sebagai gejala sosial konflik akan selalu ada pada setiap masyarakat, karena antagonisme atau perbedaan menjadi ciri dan penunjang terbentuknya masyarakat. Para sosiolog menyebutkan bahwa perbedaan sosial tidak mungkin bisa dihindari, tidak mungkin ada kelompok lapisan atas tanpa ada lapisan menengah dan bawah. Masyarakat dalam pandangan Marx terdiri dari dua kelas yang saling berbenturan, yaitu masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah atau kaum buruh (proletariat) dan majikan (pemilik modal). Meskipun ada kelas menengah yang secara genealogis mempunyai afiliasi kepentingan dengan kedua kelompok di atas, yaitu kelompok pemilik modal dan kelompok proletariat sekaligus. Posisi kelas tengah ini tidak begitu jelas, bahkan dalam bagian tertentu menjadi agen bagi para pemilik modal, tetapi juga sebagai mediator dan pembela kepentingan rakyat. (Jurdi, 2010 : 254)

Beberapa pemikir menawarkan resolusi konflik, Jack Rothman (Jurdi, 2010 : 268) mengatakan bahwa untuk mengatasi berbagai konflik yang ada dalam masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu : (1) Tindakan koersif (paksaan), perlu ada pengaturan administrative, penyelesaian hukum, tekanan politik dan ekonomi. (2) Memberikan insentif seperti memberikan penghargaan kepada suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga ketertiban dan keharmonisan. (3) Tindakan persuasive, terutama terhadap ketidakpuasan yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi realitas sosial, politik dan ekonomi. (4) Tindakan normative, yakni melakukan proses membangun persepsi dan keyakinan masyarakat akan system sosial yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan membangun system sosial yang berlaku tersebut agar tidak memicu konflik , maka system sosial (baca: masyarakat ) Indonesia dan Malaysia yang secara genealogis dan geografis memiliki beberapa kesamaan yang tercerminkan lewat produk budaya harus diselesaikan dalam pendekatan budaya pula bukan dengan pendekatan Hukum apalagi militeristik, karena masalah produk budaya harus diselesaikan oleh pemilik budaya tersebut. Hal ini tentu saja berbeda manakala yang kita selesaikan konflik yang didasari latar belakang luas territorial sebuah wilayah Negara, tentu pendekatan hukum dan politiklah yang utama dapat menyelesaikannya.

Di tengah gejolak keragaman silang pendapat masyarakat Indonesia dan Malaysia tentang siapa pemiliki sebuah Kebudayaan, yang cenderung memicu konflik, maka tindakan preventif dan represif perlu dipersiapkan sedini mungkin. Tindakan Preventif paling tidak melalui jalur pendidikan baik formal maupun non formal, pendekatan terhadap konflik sebaiknya adalah menjadikan konflik (atau kecenderungan konflik) sebagai hal yang positif, karena perlu memandang konflik dari sisi positif. Sosiolog Amerika Serikat, Lewis Cosser (1913-2003) , bertitik berat pada konsekuensi-konsekuensi terjadinya konflik pada sebuah sistem sosial secara keseluruhan. Teorinya menunjukkan kekeliruan jika memandang konflik sebagai hal yang merusak sistem sosial, karena konflik justru dapat membuka peluang integrasi antar kelompok.

Karena itu dalam masyarakat kedua Negara bertetangga ini penting dibangun pendidikan resolusi konflik berbasis pendekatan budaya sebagai salah satu upaya membangun karakter kedua bangsa baik di lingkungan formal maupun pada masyarakat luas.. Pentingnya pendidikan untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan kehidupan yang damai adalah sejalan dengan salah satu pilar pendidikan atau pilar belajar yang dinyatakan oleh UNESCO yaitu *learning how to live together in harmony*. Pentingnya pendidikan menuju perdamaian ini sebenarnya sudah dikemukakan sejak tahun 1920-an oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau menekankan tentang pentingnya pendidikan yang didasarkan pada asas tertib dan damai. Tampaknya tertib dan damai yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah damai yang dinamis yang berarti suatu kedamaian yang juga bebas dari tindakan ketidakadilan. Pendidikan resolusi konflik berbasis budaya sejalan dengan kedudukan dan peran siswa/mahasiswa sebagai generasi muda yang diharapkan menjadi warga negara dan warga dunia yang baik dan bertanggung jawab.

Program pendidikan resolusi konflik berbasis budaya adalah suatu program yang mendidik para siswa atau mahasiswa juga masyarakat luas untuk memahami konflik budaya dengan lebih baik, mampu mengendalikan emosi dan mempunyai keterampilan untuk memecahkan konflik secara konstruktif. Pendidikan resolusi konflik berbasis budaya harus sejalan dengan pengembangan kecerdasan emosional yang memainkan peranan penting dalam pengembangan kepribadian siswa/mahasiswa yang terpadu, dan masyarakat umumnya dengan pendekatan andragogi.

Alasan-alasan untuk mengadakan program pendidikan resolusi konflik berbasis budaya di sekolah digambarkan secara rinci oleh David dan Porter (Dalam Maftuh, 2008 :54) dan dapat diadaptasi dengan pendidikan resolusi konflik untuk masyarakat luas (di luar pendidikan formal) untuk membangun karakter bangsa dan mengukuhkan wawasan kebangsaan di kedua Negara yang sudah lama bersaudara dan bersahabat ini sebagai berikut,

- 1) Konflik merupakan sifat manusia yang alami dan dapat menjadi kekuatan yang konstruktif bila didekati dengan keterampilan.
- 2) Proses pemecahan masalah pada resolusi konflik dapat meningkatkan iklim sekolah.
- 3) Strategi resolusi konflik dapat mengurangi kekerasan, vandalisme, ketidakhadiran di sekolah yang parah, dan skorsing.
- 4) Pelatihan resolusi konflik membantu siswa dan guru memperdalam pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri dan orang lain serta

- mengembangkan keterampilan hidup yang penting.
- 5) Pelatihan dalam negosiasi, mediasi dan pengambilan keputusan secara konsensus mendorong kegiatan warga Negara pada tingkat tinggi.
  - 6) Mengalihkan tanggung jawab kepada siswa untuk memecahkan konflik tanpa kekerasan berarti membebaskan orang dewasa untuk berkonsentrasi lebih banyak pada mengajar dan lebih sedikit pada masalah disiplin.
  - 7) Sistem manajemen perilaku yang lebih efektif daripada penahanan, penskorsingan atau pengusiran diperlukan untuk mengatasi konflik dalam ajang sekolah.
  - 8) Pelatihan resolusi konflik meningkatkan keterampilan dalam mendengarkan, berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah yang menjadi dasar bagi semua pembelajaran.
  - 9) Pendidikan resolusi konflik menekankan keterampilan untuk melihat sudut pandang orang lain dan menyelesaikan perbedaan secara damai yang membantu seseorang untuk hidup dalam suatu dunia yang multicultural.
  - 10) Negosiasi dan mediasi merupakan alat-alat pemecahan masalah yang sangat cocok dengan masalah-masalah yang dihadapi generasi muda dan orang-orang yang dilatih dalam pendekatan-pendekatan ini sering menggunakannya untuk memecahkan masalah tanpa mencari bantuan orang dewasa.

Pendidikan Resolusi Konflik berbasis budaya baik dalam lingkup pendidikan formal maupun pada masyarakat luas, adalah dapat dijadikan upaya pencegahan konflik sebagai dampak hubungan antar bangsa masyarakat bertetangga, sehingga pendidikan resolusi konflik berbasis budaya dapat menjadi sinergi positif membangun masyarakat bertetangga secara aman sejahtera berwawasan Global, karena Budaya sebenarnya lahir untuk memanusiakan manusia bukan untuk menjadi lahan pemicu konflik manusia. Jadi siapa pemilik produk budaya khususnya dalam wujud aktifitas seni, kebiasaan dan bahasa adalah mereka masyarakat yang mau melestarikannya tanpa melihat batas Negara.

Adalah tepat untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi dalam komunitas regional Indonesia Malaysia seperti yang disebutkan oleh Talcott Parsons (1985-1986) bahwa setiap masyarakat harus dipandang secara integratif, dan perilaku sosial suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh nilai dan kebudayaannya. Nilai kebudayaan dan pola-pola lain dapat menjiwai kepribadian, sehingga mempengaruhi struktur kebutuhan yang selanjutnya menentukan kehendak seseorang atau kelompok menerapkan peranan sosialnya. Dalam pandangan Parsons bahwa setiap orang atau kelompok akan dihadapkan kepada variabel pola dikotomis, yaitu : (1) afektivitas-netralitas, (2) perluasan-kekhususan, (3) universalisme-partikularisme, (4) pribadi-kolektivitas.

Karena itu, perlu dibangun kembali wawasan regional kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan Malaysia (kawasan regional ASEAN) terhadap diri sendiri (ada keanekaragaman) yang berhadapan dengan lingkungan (dari dalam sebagai sebuah bangsa) dan lingkungan luar (dalam masyarakat global) untuk mencapai kebersamaan dalam berbudaya (bukan penyeragaman) tetapi integrasi dalam keberagaman.

Karena itu perlu sinergi positif antar komponen masyarakat dalam dua

bangsa ini, sehingga produk budaya yang dilestarikan bukanlah penyebab konflik melainkan sebagai sebuah kekayaan yang dimiliki., sebagi sunatullah dan mengandung hikmah didalamnya. Dengan demikian, membangun kesepahaman budaya dalam masyarakat kedua negara untuk memperkokoh wawasan regional maka diperlukan cara sebagai berikut,

- 1) Masyarakat pentingnya menyadari bahwa di kedua Negara terdapat keberagaman (multikultur) sebagai sunatullah dan ada hikmah didalamnya.
- 2) Pentingnya *sociability*. *Sociability* (kecakapan bermasyarakat) adalah suatu kemampuandari individu-individu di dalam masyarakat untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sosial dalam segala tindakannya, sehingga menghasilkan aktivitas untuk kebaikan bersama dalam wujud organisasi kemasyarakatan yang dibentuk secara sukarela tanpa campur tangan pemerintah. Kemampuan berorganisasi yang merupakan *collective intelegence of society* ini perlu dikembangkan. Kegagalan dan keberhasilan pembangunan politik dan ekonomi suatu Negara akan ditentukan oleh kekayaan atau kemiskinan *sociability* yang dimiliki oleh masyarakat bersangkutan (Wirutomo, 2001 : 22)
- 3) Pendidikan Resolusi Konflik berbasis Budaya. Sebagaimana telah diuraikan diatas, pendidikan resolusi konflik berbasis budaya adalah sebagai upaya membangun sinergi positif dalam masyarakat bertetangga, karena dalam pendidikan ini tidak mengajarkan apa itu konflik tetapi bagaimana konflik dapat diselesaikan dengan damai dan edukatif terlebih didekati dalam perspektif budaya.
- 4) Kesepahaman, Komunikasi antar budaya, serta keterbukaan dialog. Kesepahaman dan komunikasi antar budaya diharapkan agar tidak terjadinya prasangka ras yang dapat menimbulkan *culture shock* dan memicu konflik. Sebagaimana Suradinata (2008:257), menyebutkan perlunya keterbukaan untuk membuka perspektif dan mengembangkan potensi dan kekuatan bangsa , sikap keterbukaan semakin bermakna baik masyarakat yang majemuk, pluralistik terutama untuk menumbuhkan saling pengertian, menghormati, keterbukaan dialog dan kerjasama yang berkualitas antar budaya.
- 5) Membangun Pikiran Positif (*be positive thinking*), melalui: a) minimalisir sifat etnosentrisme/chauvinisme, suudzon; b) minimalisir arogansi kekuasaan; c) tumbuhkan sifat menghargai diri sendiri dan orang lain; d) tumbuhkan sikap reaktif terhadap penyelesaian masalah secara damai; e) tumbuhkan kemampuan empati dan simpati, toleransi

## **PENUTUP**

Membangun kesepahaman budaya dalam masyarakat bertetangga bukanlah persoalan mudah, memerlukan tanggung jawab bersama semua komponen bangsa yang ada di tiap Negara. Konflik akan teratasi manakala kita dapat mencapai kesepahaman dan kebersamaan, serta peduli menyelesaikan berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi sebagai sebuah bangsa.

Akhirnya, diandaikan bahwa kehidupan di dunia ini mengandung *dualisme* yang bisa saja berbenturan, tapi juga saling mengisi. Yang diharapkan tentunya ialah dualisme bisa dipersatukan sedemikian rupa dalam bentuk saling

kerjasama. Melalui kerjasama dan penuh pengertian keduabelah bangsa yang secara kulturil sebenarnya dapat dipersatukan ini kiranya proses saling memanfaatkan dan saling menutupi akan dimungkinkan. Persoalannya adalah adakah kemauan masing-masing komponen kedua bangsa untuk merasakan dan berintrospeksi bahwa dalam dirinya terdapat kekurangan dan kemudian dengan ikhlas mau menerima kelebihan yang dimiliki orang lain sehingga terjadilah kerjasama yang *sinergis*?

Selanjutnya, marilah kita lakukan pendekatan berfikir positif untuk membangun kedua bangsa ini akan terhindari konflik destruktif sehingga menjadi bangsa yang berwawasan global/regional : bahwa produk budaya adalah hasil sebuah masyarakat dan milik masyarakat yang mau melestarikannya secara arif untuk memaknai hakikat budaya itu sendiri. Oleh karena itu memahami konflik produk budaya dapat didekati dengan pendidikan resolusi konflik berbasis budaya.

Allah SWT dalam Alquran sebenarnya telah menegaskan bahwa Ia telah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, beranekaragam untuk saling mengasihi dan bersaudara. Masalah tidak akan selesai dengan jalan anarkis, karenanya mencari solusi terbaik adalah dengan Kesepahaman bersama masyarakat kedua bangsa. Akhirnya, Semoga kedua Negara bertetangga dan bersahabat serta bersaudara ini memiliki jalan keluar terbaik dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bangkit*. (2008). Jakarta : Kompas Gramedia.
- Jurdi, Syarifuddin. (2010). *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Maftuh, Bunyamin. (2008). *Pendidikan Resolusi Konflik*. Bandung : PPS UPI
- Shepherd, Peter. (2009). *The Positive Approach*. Yogyakarta : Rumpu.
- Syam, Nur. (2007). *Madzhab-madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LKIS.
- Suradinata, Ermaya, *Membangun Daerah menuju Indonesia*.
- Wirutomo, Paulus. (2001). *Membangun Masyarakat Adab*. Jakarta : UI.